

Nomor : KJ.04.01/B.III/501/2025
Lampiran : 5 (lima) lembar
Hal : Undangan Pertemuan Koordinasi Evaluasi
Rehabilitasi Medis (IPWL)

19 April 2025

Yth. (Daftar UndanganTerlampir)

Sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 141 Tahun 2025 tentang Institusi Penerima Wajib Laport dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan Program Terapi Rumatan Metadon, Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan RI akan menyelenggarakan kegiatan **Koordinasi dan Evaluasi Rehabilitasi Medis di Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL)**. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi, evaluasi dan mengidentifikasi kendala/permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi medis di layanan IPWL.

Kami mengundang Bapak/Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, RSUD/RSJ/RSKD/RSKO/RSUP,RSTNI/RSAL, Puskesmas dan Klinik BNN/KlinikPolri/Klinik Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta Klinik Swasta yang terdaftar sebagai IPWL, untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut secara daring (Via Zoom) pada:

hari, tanggal : Selasa - Kamis, 22 – 24 April 2025
waktu : Pukul 13.00 WIB – selesai
agenda : Pertemuan Evaluasi Rehabilitasi Medis Napza
meeting zoom : 892 6701 6288
password : Yankesren
tautan/link : [https://us02web.zoom.us/j/89267016288?
pwd=PJTyu1WsxbkLvFdIMIAsg2Bos8uQW8.1](https://us02web.zoom.us/j/89267016288?pwd=PJTyu1WsxbkLvFdIMIAsg2Bos8uQW8.1)

Mengingat pentingnya kegiatan ini, kami mohon Bapak/Ibu agar hadir tepat waktu. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr.Jurisman Nazara (No.Whatshapp: 08119148788) atau Sdr. Rijal (No. Whatshapp: 087888120545)

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok



dr. Imran Pambudi, M.P.H.M

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan dilaporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

Lampiran 1 Daftar Undangan Peserta
Nomor : KJ.04.01/B.III/501/2025
Tanggal: 19 April 2025

DAFTAR UNDANGAN

A. Peserta Pusat :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
2. Kepala Badan Narkotika Nasional RI
3. Kepala Kejaksaan Republik Indonesia
4. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat
5. Kepala Pusdokkes Polri
6. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
7. Direktur Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer
8. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer
9. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

B. Peserta Daerah :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Riau
15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
16. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi
17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
18. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung
19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung
20. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Bangka Belitung
21. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
22. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat
23. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
24. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur
25. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
26. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
27. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
28. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
29. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
30. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Utara
31. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
32. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Banten
33. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

34. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi DK Jakarta
35. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
36. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat
37. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
38. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah
39. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY
40. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi DIY
41. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
42. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur
43. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
44. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Bali
45. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT
46. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi NTT
47. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB
48. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi NTB
49. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
50. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Gorontalo
51. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
52. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Barat
53. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
54. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
55. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
56. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Utara
57. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
58. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
59. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
60. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku
61. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
62. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku Utara
63. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua
64. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Papua
65. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
66. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Papua Barat
67. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah
68. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Papua Tengah
69. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Pegunungan
70. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Pegunungan
71. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan
72. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Papua Selatan
73. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya
74. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Provinsi Papua Barat Daya
75. Seluruh Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) di wilayah 38 Provinsi

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok



dr. Imran Pambudi, M.P.H.M

Lampiran 2 Agenda Rapat
 Nomor : KJ.04.01/B.III/501/2025
 Tanggal : 19 April 2025

AGENDA RAPAT TENTATIF (DARING)
Koordinasi dan Evaluasi Rehabilitasi Medis
Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)
Tanggal 22 – 24 April 2025

Waktu	Kegiatan	Pelaksana
Hari Ke 1		
Selasa, 22 April 2025		
13.00 – 13.05	Pembukaan	Timker Tata Kelola Gangguan Penggunaan Napza
13.05 – 13.15	Sambutan dan Arahan	Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan
13.15 – 13.30	Kebijakan Institusi Wajib Lapori (IPWL) Tahun 2025	Ketua Tim Kerja Tata Kelola Gangguan Penggunaan Napza
13.30 – 15.45	Dikusi Koordinasi dan Evaluasi Layanan IPWL Bersama 10 Provinsi <ol style="list-style-type: none"> 1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Riau 4. Sumatera Barat 5. Jambi 6. Bengkulu 7. Sumatera Selatan 8. Bangka Belitung, 9. Kepulauan Riau 10. Lampung 	Tim Kerja Napza
15.45 – 16.00	Penutup	Ketua Tim Kerja Tata Kelola Gangguan Penggunaan Napza
Hari Ke 2		
Rabu, 23 April 2025		
13.00 – 13.15	Sambutan dan Arahan	Ketua Tim Kerja Tata Kelola Gangguan Penggunaan Napza
13.15 – 13.30	Kebijakan Institusi Wajib Lapori (IPWL) Tahun 2025	Tim Kerja Tata Kelola Gangguan Penggunaan Napza
13.30 – 15.45	Diskusi Evaluasi IPWL bersama 10 Provinsi <ol style="list-style-type: none"> 1. Banten 2. DKI Jakarta 3. Jawa Barat 	Tim Kerja Tata Kelola Gangguan Penggunaan Napza

	4. Jawa Tengah 5. DIY 6. Jawa Timur 7. NTB 8. Bali 9. Kalimantan Tengah 10. Kalimantan Barat	
15.45 – 16.00	Penutup	Ketua Tim Kerja Tata Kelola Gangguan Penggunaan Napza
Hari Ke 3 Kamis, 24 April 2025		
13.00 – 13.15	Sambutan dan Arahan	Ketua Tim Kerja Tata Kelola Gangguan Penggunaan Napza
13.15 – 13.30	Kebijakan Institusi Wajib Lapor (IPWL) Tahun 2025	Tim Kerja Tata Kelola Gangguan Penggunaan Napza
13.30 – 15.45	Diskusi Evaluasi IPWL dengan Provinsi 1. Sulawesi Utara 2. Sulawesi Tengah 3. Gorontalo 4. Sulawesi Selatan 5. Sulawesi Tenggara 6. Sulawesi Barat 7. Maluku 8. Maluku Utara 9. NTT 10. Kalimantan Utara 11. Kalimantan Timur 12. Papua 13. Papua Barat 14. Papua Barat Daya 15. Papua Pegunungan 16. Papua Selatan 17. Papua Tengah	Tim Kerja Tata Kelola Gangguan Penggunaan Napza
15.45 – 16.00	Penutup	Ketua Tim Kerja Tata Kelola Gangguan Penggunaan Napza

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok



dr. Imran Pambudi, M.P.H.M